

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi Supriadi Jaya, Skripsi: *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*, (Makassar: Unismuh Makassar, 2018), hal. 14.
- Abdul Manan, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*”, Hakim Agung pada Muhkamah, 2013, hal. 190.
- Adnan, H. (2016). Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8(2)
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009) hal. 66
- Ali Fauzan, “*Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*”, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 81.
- Andyana, Suprpta. 2021. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Lembaga Demokrasi Desa di Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. Locus Majalah Ilmiah FISIP. Vol. 13 No. 1. Hal. 80.
- Assegaf Syarifah Devi, Skripsi: *Pelanggaran Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*, (Makassar: Unismuh Makassar, 2017), hal. 3.
- Bakir, R. S., & Suryanto, S. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2009. Tangerang: Karisma Publishing Group.

- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa
- Erga Yuhandra. *Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam menjalankan fungsi legislasi*. Vol, 3, No, 2. *Jurnal Legislasi*. (2016). Hal. 72.
- Ferry, K. (2017). *Kedudukan Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hasjimzoem, Y. (2014). *Dinamika hukum pemerintahan desa*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 467
- HAW Wijaya. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 94.
- <https://dosapple.com/pentingnya-perundang-undangan/>,
- Innani Koernia, “*Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin*”, Institut Agama Islam NegeriPonorogo, 2019, hal. 32.
- Iwan Fachrozi, dkk. (2020). *Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Kusmanto, H. (2013). *Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat*. *JPPUMA: Jurnal Ilmu*

Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 1(1), 28-36.

Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160583.

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 132.

Luwihono, S. (2005). Manfaat dan Arti Pentingnya Peraturan Desa bagi Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Desa.

M.Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Manteri Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 22.

Mamesah, Findy Y. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompasso*. Vol, 2, No, 6. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*. (2015). Hal. 3.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet 1*, (NTB: Mataram University Press, 2020)

Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Pebriansyah Yusep, *Skripsi: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hal. 18.

- Putri, L. S. (2018). Kewenangan desa dan penetapan peraturan desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 161-175.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rukin, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019. hal 6
- Saiful, S. Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (Doctoral dissertation, Tadulako University). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 6(2), 1.
- Simamora Taraja Jendi, dkk. *Kedudukan PeraturanDesa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan di Indonesia*. Vol, 8 No, 2. *Jurnal Hukum*. (2019). Hal. 97.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 244.
- Suhardono, E. (2016). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suprpto Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 67.
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,2007)hal.42
- Wibawa, dkk. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar*. Vol, 2 No, 3. *Jurnal Kontruksi Hukum*. (2021). Hal. 445.

Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa. *Jurnal Independent*, 2(1), 43.